

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :	05
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OPINI WTP**

- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Agus Priyono menyerahkan LHP kepada Wali Kota Fairid Naparini di Auditorium BPK RI Perwakilan Kalteng di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, Jumat (13/5).

TAHERWAN YULIANUS SI

Pemko Kembali Pertahankan Opini WTP 6 Kali

PALANGKA RAYA - Predikat yang membanggakan, kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dimana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan di Tahun 2021 yang lalu. Predikat WTP ini merupakan yang ke 6 kalinya secara berturut turut, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Agus Priyono kepada Pemko Palangka Raya yang diterima oleh Wali Kota Fairid Naparini serta didampingi Ketua DPRD Kota, Sigit K Yunianto di Auditorium BPK RI Perwakilan

Kalteng di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, Jumat (13/5).

"Alhamdulillah Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mendapatkan opini WTP kembali yang ke 6 kalinya. Dibawah kepemimpinan saya setidaknya sudah 3 kali WTP diraih, yakni ditahun 2019, 2020 dan 2021," ujar Fairid saat ditemui usai kegiatan tersebut.

Orang nomor satu di kota Palangka Raya tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota yang telah bekerja sama dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehinggai pencapaian berupa predikat opini WTP kembali dipertahankan.

"Juga kepada tim dari BPK RI, saya sampaikan rasa terima kasih

atas segala kerja sama selama ini. Terutama bimbingan dan saran dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah," tuturnya.

Selain itu, Fairid berharap agar tindak lanjut atas rekomendasi serta catatan yang diberikan oleh pihak BPK RI dapat segera dilakukan jajaran Pemko dan bisa selesai dalam kurun waktu 60 hari. Selama kurun 3 tahun WTP, kata Fairid pemerintah kota telah membenah permasalahan aset, menggali potensi pendapatan asli daerah.

"Kalau di Kota Palangka Raya permasalahan aset cukup besar, jadi satu persatu diselesaikan hingga semakin sedikit. Saya tak lupa mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemko agar bisa lebih konsisten lagi untuk melakukan perbaikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. rgb